



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT WAGE

2 FEBRUARI 2024 (21 REJEB 1957 / TAHUN LXXIX NO 125)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Terbukti Membunuh 12 Korbannya Dukun Palsu Divonis Mati



Tohari alias Mbah Slamet digiring petugas Kejaksaan meninggalkan ruang sidang setelah divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Kamis (1/2/2024).

BANJARNEGARA (KR) - Terbukti membunuh 12 orang yang ditipunya dengan modus pelipatgandaan uang, Tohari alias Mbah Slamet (46) warga Desa Balun Kecamatan Wanayasa Banjarnegara, Kamis (1/2) divonis mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara. Hukuman dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Niken Rochayati SH dengan anggota Tomi Sugianto SH dan Arief Wibowo SH.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa 12 orang. Dan perbuatan dilakukan secara dingin dan sadis," kata Niken Rochayati. Menurut majelis hakim, dakwaan pertama untuk Mbah Slamet yakni Pasal 340 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencana, terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Selain itu, terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana praktik pengandaan uang untuk berbagai keperluan pribadi, foya-foya dan main karaoke. Selain pasal pembunuhan berencana, terdakwa terbukti melakukan penipuan dan uang palsu. "Majelis hakim tidak melihat ada hal yang meringankan bagi terdakwa," ujar Niken Rochayati.

Putusan hakim yang mencapai ratusan lembar dibacakan secara bergantian selama beberapa jam. Wajah Tohari alias Mbah Slamet tampak tegang mendengar vonis yang dijatuhkan padanya. Di penguji persidangan, Mbah Slamet menyatakan banding. * Bersambung hal 7 kol 5

PETISI 'INDONESIA DARURAT KENEGARAWANAN' UII Desak Jokowi Kembali Jadi Teladan Etika

SLEMAN (KR) - Giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'. Karena, dalam dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menjunjukkan tanpa rasa malu praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengarahkan sumberdaya negara. Demokrasi Indonesia makin tergerus dan mengalami kemunduran.

Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD membacakan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UII di halaman Auditorium Kahar Muzakkar, Kamis (1/2). Rektor menyebut pernyataan sikap ini tidak elitis, karena dilakukan seluruh sivitas akademika dan dihadiri guru besar, dosen, dekan, mahasiswa bahkan karyawan dan alumni UII. Tampak hadir Prof Dr N'imatul Huda, Prof Nandang Sutrisno, Prof Allwar, Prof Jaka Nugraha dan lain-lain.

"Kemarin saudara kami, UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur, kami menyerukan Petisi Indonesia Darurat Kenegarawanan. Kami berharap hal ini juga diikuti perguruan tinggi lain, sebagai wujud tanggungjawab moral anak bangsa," ujar Rektor UII.

Menurut Prof Fathul, kondisi bangsa kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023," katanya.

Gejala makin mengemuka ketika Jokowi menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak. Perkembangan bermutakhir, lanjut Fathul, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu.

* Bersambung hal 7 kol 1



Rektor UII Prof Fathul Wahid PhD membacakan Petisi 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' didampingi sivitas akademika.

Analisis Pikiranmu, Pikiranmu

Prof Dr Sudjito Atmoredjo

PAGI yang sejuk. Puisi Kahlil Gibran, turut menginspirasi munculnya kehendak berbagi. Perihal akal-pikiran. Berpikir tentang diri sendiri dan orang lain. Sama sekali tak terkait dengan Gibran sebagai Cawapres.

Aku hidup bersama pikiranmu. Engkau hidup bersama pikiranmu. Aku dan engkau, tak selalu dalam kebersamaan. Fitrah perbedaan, kadang memisahkan kita. Sejak pikiran, sikap, dan perilaku.

Pikiranmu bergerak dalam kendali hati-nurani. Boleh jadi, pikiranmu bergerak dalam kendali nafsu. Hati-nurani mendorong pikiranmu agar merawat kebersihan jiwa dan raga. Walau hidup, miskin harta-benda. Pikiranmu, melahirkan impian-impian kosong. Tentang istana, popularitas, dan kegagahan sepanjang waktu.

Pikiranmu berjuang. Menjelaskan arti penting keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sejati. Pikiranmu akrobatik. Tentang hukum dan hakim. Untuk penaklukan dan penindasan.

Apa boleh buat? Lantaran jurang pemisah antara pikiranmu dan pikiranmu, maka kita bersama dalam perbedaan. Kadang bersatu. Tetapi, di saat tertentu, berseteru. Lantas. Kapan pikiran, bangsa ini dapat dipertemukan?

Berpikir adalah pendayagunaan akal. Merupakan aktivitas rohaniyah. Ciptaan Allah pertama adalah akal. Lalu, Allah

* Bersambung hal 7 kol 1

MAHFUD MD TEMUI PRESIDEN Titip BLBI, Pelanggaran HAM dan UU MK

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD menitipkan persoalan terkait penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat dan revisi undang-undang MK ke Presiden Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden.

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2), Mahfud menyebut tiga persoalan itu menjadi catatan khusus selama menjabat sebagai Menko Polhukam. "Tentang utang BLBI, saya katakana kepada Presiden, Bapak pernah memberi inpres (instruksi presiden) kepada kami untuk mulai menagih utang BLBI. Waktu itu jumlahnya Rp 110 triliun lebih. Dalam 1,5 tahun kami be-



Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno usai menyampaikan permohonan pengunduran diri.

kerja sekarang terkumpul, yang di tangan kami Rp 35,7 triliun, yang kalau dihitung persentasenya 31,8 persen," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam.

Mahfud, kepada Presiden, menyampaikan penagihan utang BLBI pen-

ting, karena itu merupakan uang negara. "Saya katakana ke Bapak Presiden, ini tagihan masih ada, karena masih ada yang mengelak dan ada yang menawar," ucap Mahfud.

Kemudian, Mahfud juga * Bersambung hal 7 kol 1

PENYESUAIAN GAJI ASN Naik 8 Persen, Pensiunan 12 Persen

JAKARTA (KR) - Terhitung mulai 1 Januari 2024, pemerintah melakukan penyesuaian gaji dan pensiun pokok PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/ke-merdekaan. Secara umum, besaran perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen.

"Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah. Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas," kata Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Kamis (1/2).

Dikatakan, untuk pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:56	15:14	18:08	19:21	04:19

Jumat, 2 Februari 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

HORMATI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN KPK Tetap Proses Eddy Hiarije

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi. Meski demikian tetap memproses kasus dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarije (EOSH) alias Eddy Hiarije.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, keputusan KPK tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan KPK, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK. "Dan putusannya bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya di Jakarta, Kamis (1/2).

Ali menjelaskan, perkara peradilan hanya menguji aspek formil. Sedangkan substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurus administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dijelaskan demikian, menurut Ali, karena substansi * Bersambung hal 7 kol 5

KASUS KORUPSI PEMANFAATAN TKD

Lurah Maguwoharjo Jalani Sidang Perdana

YOGYA (KR) - Sidang kasus korupsi penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah Kapanewon Depok kembali bergulir. Kali ini, Lurah Maguwoharjo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Munif SH MH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Yogya, Kamis (1/2).

"Gubernur DIY tidak pernah memberikan izin sewa terhadap TKD Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh saksi Robinson Saalino (sudah divonis 8 tahun-red) selaku Direktur PT Indonesia Internasional Capital

(IIC)," papar JPU saat membacakan dakwaan. Dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa No 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022

dari hasil peninjauan lokasi di lapangan, PT IIC telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai yang dimohonkan. "Berdasarkan hasil koordinasi bersama di-

sepakati semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan, Permohonan pemanfaatan TKD atas nama PT ICC seluas +39.595 m2 dikembalikan pada Peme-

rintah Kalurahan Maguwoharjo," jelas JPU.

Terdakwa Kasidi selaku Lurah dinilai tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dalam

* Bersambung hal 7 kol 1



Sidang perdana terdakwa korupsi TKD Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman.

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● SENIN 1 Januari 2024, saya diberi dua anak kucing oleh teman. Satu kucing sangat hiperaktif, menggerogoti kabel, menggosak-asik meja dan almari. Ketika akan saya kembalikan, kucing itu malah lepas di jalan. (Mehartini, Joyonegaran Mg 2/946 Merjonegaran Yogyakarta 55151)-d